

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(L K P J)
2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaanNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022. LKPJ ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan LKPJ Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ ini memuat Dasar Hukum (Perda Pembentukan Daerah), Visi dan Misi, Gambaran Umum Perangkat Daerah, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Baa, 13 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Daud D. Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196908111998011002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum (Perda Pembentukan Perangkat Daerah)..... 1
- 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 1
- 1.3 Data Nominatif Pegawai 2

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 6

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH..... 9

BAB IV PENUTUP 17

BAB I

PENDAHULUAN

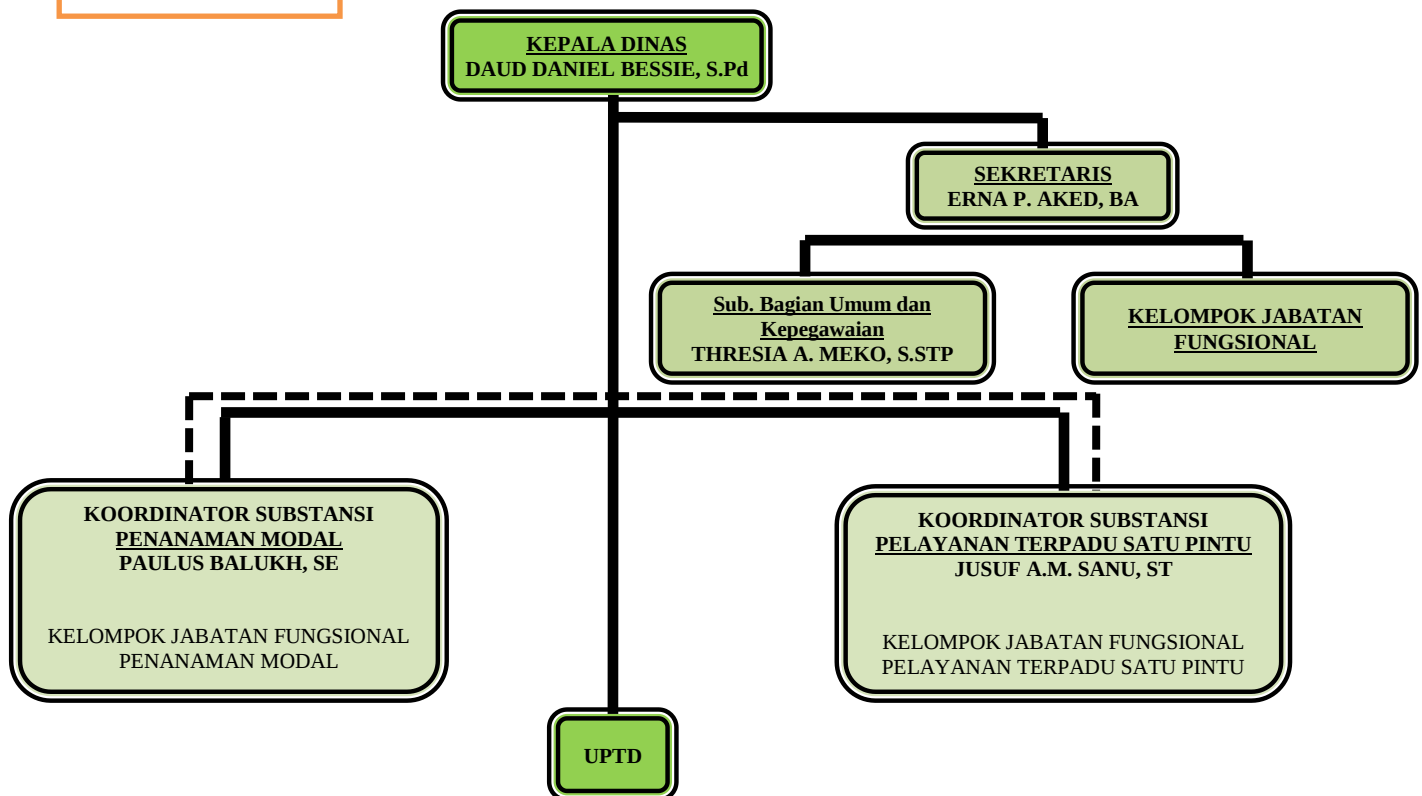
1.1 Dasar Hukum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO



Keterangan :

———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

1.3 Data Pegawai (Kondisi Per tanggal 31 Desember 2022)

1. Daftar Nominatif Pegawai;

TABEL 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Daud D. Bessie, S.Pd	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas	S1	
2	Erna P. Aked, BA	Pembina Tk.1/ IV b	Sekretaris	D3	
3	Paulus Balukh, SE	Pembina / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Penanaman Modal)	S1	
4	Justus Sakan, SH	Pembina / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S1	
5	Jusuf A. M. Sanu, ST	Pembina / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator PTSP)	S1	
6	Senisulita Lami, SE	Penata Tk I / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S1	
7	Yulensi A. Amalo, SH	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub koordinator Evaluasi dan Pelaporan)	S1	
8	Thresia A. Meko, S.STP	Penata Tk I / III d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1	
9	Carolina P. Fanggidae, SE	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha)	S1	

10	Yeli E. Foeh, SE	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal)	S1	
11	Petronela Giri,SE	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pemantauan dan Pembinaan)	S1	
12	Sarina Saudale, SE	Penata Tk I / III d	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1	
13	Gustan Bessie, SE	Penata / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Non Perijinan	S1	
14	Husain Mitan, S.Sos	Penata / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Keuangan & Aset)	S1	
15	Sony Anin, SE	Penata / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perijinan)	S1	
16	Sherly Ndun, SE	Penata / III c	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Penanaman Modal)	S1	
17	Yulia Mansula, SH	Penata Muda Tk.1/III b	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator	S1	

			Informasi dan Pelayanan Pengaduan)		
18	Dedy Ph. E Manafe, SE	Penata Muda/ III a	Pelaksana	S1	
19	Miswar Simin	Penata Muda/ III a	Pelaksana	SMA	
20	Jeri Faharudin	Pengatur Tk I/ II d	Pelaksana	SMA	
21	Merni S. Adoe	Pengatur Tk I/ II d	Pelaksana	SMA	

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2022

1.3.1 JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN

Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
Jumlah Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Fungsional	Jumlah Fungsional Umum	Jumlah
3 Orang	14	4	21

1.3.2 JUMLAH PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN

Golongan Kepangkatan			Jumlah
Golongan	Laki-laki	Perempuan	
I/a			
I/b			
I/c			
I/d			
II/a			
II/b			
II/c			
II/d	1	1	2
III/a	2		2
III/b	-	1	1
III/c	-	1	1
III/d	3	6	9
IV/a	3	1	4
IV/b	-	1	1
IV/c	1	-	1

IV/d	-	-	-
Total	10	11	21

1.3.3 JUMLAH PNS BERDASARKAN PEJABAT STRUKTURAL

Jumlah Pejabat Struktural			Jumlah
Eselon	Laki-laki	Perempuan	
I/a	-	-	
I/b	-	-	
II/a	-	-	
II/b	1	-	1
III/a	-	1	1
III/b			
IV/a	-	1	1
IV/b	-	-	-
Total	1	2	3

1.3.4 JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Jumlah Pejabat Struktural			Jumlah
Jenjang	Laki-laki	Perempuan	
SD	-	-	-
SLTP	-	-	-
SLTA	2	1	3
D1	-	-	-
D2	-	-	-
D3	-	1	1
S1	8	9	18
S2	-	-	-
S3	-	-	-

1.3.5 JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN

Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	1	2	3
Fungsional Umum	3	1	4
Fungsional tertentu	6	8	14
Total	10	11	21

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Gambaran mengenai Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Alokasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 2.572.232.629,- bertambah sebesar Rp. 103.429.000,- atau 4,02% menjadi Rp.2.675.661.629,- dengan rincian :

1. Belanja Operasi semula Rp. 2.572.232.629,- bertambah sebesar Rp. 103.429.000,- atau 4,02% menjadi Rp. 2.675.661.629,- terdiri dari:
 - Belanja Pegawai semula Rp. 1.679.275.899,- bertambah sebesar Rp.77.000.000,- atau 4,59% menjadi Rp. 1.756.275.899,-
 - Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 892.956.730,- bertambah sebesar Rp.26.429.000,- atau 2,38% menjadi Rp. 919.385.730,-
2. Belanja Modal (Tidak ada)
3. Belanja Tidak terduga (Tidak ada)
4. Belanja Transfer (Tidak ada)

TABEL 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.572.232.629	2.675.661.629	103.429.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	51.200.000	10.200.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	38.200.00	10.200.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000	-

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.682.556.899	1.759.556.899	77.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.622.275.899	1.699.275.899	77.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.281.000	60.281.000	-
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	75.000.000	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000	75.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat daerah	87.780.000	94.432.000	6.652.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	500.000	500.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.435.000	7.435.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.700.000	5.700.000	-
	Penyediaan Bahan/Material	7.433.060	7.433.060	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.145.000	80.797.000	6.652.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.482.500	27.482.500	-
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.482.500	26.482.500	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.992.700	51.138.700	13.146.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.992.700	51.138.700	13.146.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	40.000.000	40.000.000	-
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	-
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	-
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	153.999.830	153.998.530	-
	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang	153.999.830	153.999.830	-

	menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	153.999.830	153.999.830	-
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	392.223.000	388.654.000	(3.569.000)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	392.223.000	388.654.000	(3.569.000)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	55.090.000	-	(55.090.000)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	234.823.000	208.214.000	(26.609.000)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.310.000	180.440.000	78.130.000
	TOTAL	2.572.232.629	2.675.661.629	103.429.000

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2022

BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

TABEL 3.1
Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
bersama Bupati Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin	90,21 Poin
2	Meningkatnya Investasi	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	70 PMA/ PMDN	74 PMA/ PMDN
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)	165.000.000.000	788.394.339.000
		Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	100.000.000.000	56.321.429.278
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Persentase Bangunan/ Usaha Berijin	70 %	104%

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.093.009.099,-	2.057.204.766	98,29
2.	Promosi Penanaman Modal	40.000.000,-	40.000.000,-	100
3.	Pelayanan Penanaman Modal	153.998.530,-	152.628.423	99,11
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	388.654.000,-	374.470.973	96,35

3.2 Realisasi Anggaran :

Adapun alokasi anggaran, program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.675.661.629,- realisasi sebesar Rp. 2.624.304.162,- atau 98,08%

1. Belanja Operasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.675.661.629,- realisasi sebesar Rp. 2.624.304.162,- atau 98,08%
2. Belanja Modal (Tidak ada)
3. Belanja Tidak terduga (Tidak ada)
4. Belanja Transfer (Tidak ada)

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.093.009.099	2.057.204.766	98,29
	a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.200.000	51.135.000	99,87
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.200.000	38.160.000	99,90
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.975.000	99,81
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.556.899	1.738.401.733	98,80
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.699.275.899	1.678.120.733	98,76
	• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.281.000	60.281.000	100
	c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
	• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
	d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	75.000.000	100
	• Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000	71.250.000	95
	e) Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.432.000	94.431.139	99,99
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	100
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.435.000	7.435.000	100
	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.700.000	5.700.000	100

	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.797.000	80.796.139	99,99
	f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.482.500	18.555.194	67,52
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	988.000	98,80
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.482.500	17.567.194	66,34
	g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.137.700	79.231.700	97,65
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.138.700	49.232.700	96,27
2	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Program Promosi Penanaman Modal	29.999.000 40.000.000	29.999.000 40.000.00	100 100
	a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	40.000.000	40.000.000	100
	• Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	40.000.000	40.000.000	100
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	153.998.530	152.628.423	99,11
	a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	153.998.530	152.628.423	99,11
	• Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	153.998.530	152.628.423	99,11
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	388.654.000	374.470.973	96,35

	Modal			
	a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	388.654.000	374.470.973	96,35
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	208.214.000	201.465.973	96,76
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	180.440.000	173.005.000	95,88
	TOTAL	2.675.661.629	2.624.304.162	98,08

3.3 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Tabel 3.4

N o.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub Keg.	Tar get	Realis asi	Permasala- han	Upay a mengatas i permasalahan
1.	Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	DPMPTSP		Program Promosi Penanaman Modal	20 UM KM	1.938 UMKM	-	-
				Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	20 UM KM	1.938 UMKM	-	-
				Pelaksanaan kegiatan promosi	20 UM	1.938 UMKM	-	-

				penanaman modal daerah kabupaten/kota	KM			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	1550 Ijin	1117	Adanya pengalihan pengurusan perijinan dari Offline ke online	-
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1550 Ijin	1117	-	-
				Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1550 Ijin	1117	-	-
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51 PM A/P MD N	74 PMA/P MDN		
				Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	51 PM A/P MD N	74 PMA/P MDN		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Modal	51 PM A/P MD N	74 PMA/P MDN	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal	51 PM A/P MD N	74 PMA/P MDN	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal	51 PM A/P MD N	74 PMA/P MDN	-	-

3.4 Analisis kesesuaian Program/kegiatan/sub kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan namun pada Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota /sub kegiatan Pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal tidak mencapai target 1550 izin dengan realisasi sebesar 1117 Izin dikarenakan adanya pengalihan pengurusan perijinan dari *offline* ke *online* (melalui system Online Single Submission Risk Based Area / OSS-RBA) sehingga banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum memahami perijinan online tersebut.

3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.5
Kebijakan Strategis

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	-	-	-
2.			

Untuk Tahun 2022, Kebijakan Strategis yang Ditetapkan oleh Bupati Rote Ndao selaku Kepala Daerah tidak ada untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rote Ndao.

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.6
Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No.	Rekomendasi DPRD	Tindakan lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	DPRD memberikan catatan terhadap Proses Pembuatan IMB agar biayanya digratiskan bagi masyarakat ekonomi lemah	Belum ada tindak lanjut karena belum ada aturan yang mendukung	-
2.	DPRD memberikan catatan terhadap biaya ijin membangun bangunan pada wilayah komersial yang masih	Sementara dalam proses revisi Perda terkait Retribusi PAD	Peningkatan PAD

	rendah agar dinaikan sehingga berdampak pada peningkatan PAD karena itu DPRD memintah kepada Pemerintah untuk merevisi Perda dimaksud.	
--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran yang diberikan.

Ba'a, 13 Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Daud D. Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196908111998011002

